

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Gudang

Gudang merupakan salah satu elemen penting dalam sistem logistik dan manajemen persediaan yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan barang sebelum didistribusikan kepada pengguna atau konsumen. Menurut Sugiyono (2020), gudang dapat diartikan sebagai fasilitas yang digunakan untuk menyimpan barang dalam jangka waktu tertentu dengan tujuan menjaga kualitas dan kuantitas barang tersebut. Selain itu, gudang juga tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan, tetapi juga sebagai pusat aktivitas operasional seperti penerimaan barang, penyimpanan, pemeliharaan, hingga pendistribusian barang. Dalam konteks instansi pemerintahan, gudang memiliki peran strategis dalam mendukung pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara sistematis dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dengan demikian, gudang dapat disimpulkan sebagai fasilitas yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola barang secara terstruktur guna mendukung kelancaran operasional organisasi. ya.

2.1.1.1 Fungsi Gudang

Gudang memiliki berbagai fungsi penting dalam mendukung aktivitas operasional, khususnya dalam pengelolaan barang persediaan. Assauri (2019), menjelaskan fungsi utama gudang adalah sebagai tempat penyimpanan barang agar tetap aman dan terjaga kualitasnya sebelum

digunakan atau didistribusikan. Selain itu, gudang juga berfungsi sebagai tempat pengendalian persediaan, dimana setiap barang yang masuk dan keluar dicatat secara sistematis untuk memudahkan proses monitoring dan evaluasi. Fungsi lainnya adalah sebagai tempat konsolidasi barang, yaitu mengumpulkan barang dari berbagai sumber sebelum didistribusikan ke tujuan tertentu. Dalam praktiknya, gudang juga berperan dalam menjaga kelancaran arus barang, mengurangi risiko kerusakan, kehilangan, serta meminimalisir terjadinya ketidaksesuaian antara data dan kondisi fisik barang.

2.1.1.2 Peran Gudang dalam Pengelolaan Barang Persediaan

Gudang memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan barang persediaan, terutama dalam memastikan ketersediaan barang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Gudang menjadi pusat aktivitas dalam proses penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran barang yang harus dilakukan secara tertib dan akurat. Menurut Assauri (2019) dalam pengelolaan persediaan gudang berperan dalam menjaga keseimbangan antara jumlah barang yang tersedia dengan kebutuhan operasional apabila pengelolaan gudang tidak dilakukan dengan baik, maka dapat menimbulkan berbagai permasalahan seperti kelebihan stok (*overstock*), kekurangan stok (*stockout*), maupun ketidaksesuaian antara data dan kondisi fisik barang. Selain itu, gudang juga berperan dalam mendukung kegiatan inventarisasi melalui proses *stock opname* secara berkala. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara pencatatan dengan kondisi nyata di lapangan.

2.1.2 Persediaan

Persediaan merupakan salah satu elemen penting dalam kegiatan operasional organisasi, baik pada sektor swasta maupun sektor publik. Keberadaan persediaan menjadi faktor penunjang utama dalam memastikan bahwa seluruh aktivitas organisasi dapat berjalan secara lancar tanpa hambatan akibat kekurangan barang. Dalam konteks manajemen operasional, persediaan tidak hanya dipandang sebagai kumpulan barang, tetapi juga sebagai bagian dari sistem yang harus dikelola secara efektif dan efisien.

Menurut Heizer dan Render (2020), persediaan adalah bahan atau barang yang disimpan untuk digunakan dalam proses produksi atau untuk memenuhi kebutuhan di masa yang akan datang. Definisi ini menekankan bahwa persediaan berfungsi sebagai cadangan (*buffer*) untuk mengantisipasi ketidakpastian permintaan maupun gangguan dalam proses pengadaan barang. Dengan adanya persediaan, organisasi dapat tetap beroperasi meskipun terjadi keterlambatan dalam pengiriman atau perubahan kebutuhan. Sementara itu, Assauri (2019) mendefinisikan persediaan sebagai sejumlah barang yang disediakan untuk digunakan dalam kegiatan operasional organisasi guna memenuhi kebutuhan secara berkesinambungan. Definisi ini menyoroti pentingnya persediaan dalam menjaga kontinuitas kegiatan operasional, terutama dalam organisasi yang memiliki tingkat aktivitas tinggi dan kebutuhan barang yang beragam.

Selain itu, Ristono (2019) menyatakan bahwa persediaan merupakan sumber daya yang disimpan untuk mengantisipasi kebutuhan di masa yang akan datang. Dalam pandangan ini, persediaan tidak hanya dilihat sebagai barang fisik, tetapi juga sebagai bentuk perencanaan strategis untuk menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional. Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa persediaan merupakan aset yang memiliki peran strategis dalam mendukung kelangsungan operasional organisasi. Oleh karena itu, pengelolaan persediaan harus dilakukan sistematis agar dapat memberikan manfaat optimal bagi organisasi.

2.1.2.1 Fungsi Persediaan

Persediaan memiliki berbagai fungsi penting dalam mendukung kegiatan operasional organisasi. Salah satu fungsi utama persediaan adalah sebagai alat untuk mengantisipasi ketidakpastian permintaan. Menurut Heizer dan Render (2020), persediaan berfungsi sebagai buffer yang dapat melindungi organisasi dari fluktuasi permintaan maupun keterlambatan pasokan. Selain itu, persediaan juga berfungsi untuk menjaga kelangsungan operasional organisasi. Tanpa adanya persediaan, kegiatan operasional dapat terhenti ketika terjadi kekurangan barang. Assauri (2019) menyatakan bahwa persediaan berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan barang. Fungsi lain dari persediaan adalah untuk meningkatkan efisiensi operasional. Dengan adanya persediaan dalam

jumlah tertentu, organisasi dapat mengurangi frekuensi pengadaan barang, sehingga dapat menekan biaya administrasi dan transportasi. Selain itu, persediaan juga dapat membantu organisasi dalam menghadapi kondisi darurat atau situasi yang tidak terduga. Dalam konteks instansi pemerintah, fungsi persediaan tidak hanya terbatas pada aspek operasional, tetapi juga berkaitan dengan aspek administrasi dan akuntabilitas. Persediaan harus dikelola dengan baik agar dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2.1.2.2 Jenis Persediaan

Persediaan dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis berdasarkan fungsi dan penggunaannya dalam organisasi. Menurut Ristono (2019), persediaan terdiri dari bahan baku, barang dalam proses, barang jadi, serta perlengkapan operasional. Dalam konteks instansi pemerintah, jenis persediaan yang paling umum adalah persediaan barang habis pakai, seperti alat tulis kantor (ATK), perlengkapan administrasi, serta barang pendukung lainnya. Persediaan jenis ini memiliki karakteristik penggunaan yang cepat dan memerlukan pengelolaan yang lebih intensif.

Heizer dan Render (2020) juga mengelompokkan persediaan menjadi bahan mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Pengelompokan ini bertujuan untuk mempermudah pengelolaan dan pengendalian barang dalam organisasi. Dengan adanya klasifikasi persediaan, organisasi dapat mengelola barang secara lebih terstruktur dan efisien. Hal ini juga mempermudah dalam proses pencatatan dan pengawasan persediaan.

2.1.2.3 Persediaan Dalam Instansi Pemerintah

Dalam instansi pemerintah, persediaan merupakan bagian dari aset negara yang harus dikelola secara akuntabel. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 terkait Barang Milik Negara, persediaan termasuk dalam kategori Barang Milik Negara yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional. Pengelolaan persediaan dalam instansi pemerintah memiliki karakteristik yang berbeda dengan sektor swasta. Hal ini dikarenakan pengelolaan tersebut harus mengacu pada prinsip transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Persediaan yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan berbagai permasalahan, seperti ketidaksesuaian data, pemborosan, serta kesulitan dalam proses pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan yang baik untuk memastikan bahwa persediaan dapat digunakan secara optimal

2.1.3 Manajemen Persediaan

Manajemen persediaan merupakan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan persediaan agar tersedia dalam jumlah yang optimal sesuai dengan kebutuhan organisasi. Menurut Heizer dan Render (2020), manajemen persediaan adalah proses untuk menentukan jumlah dan waktu penyediaan barang agar dapat memenuhi kebutuhan dengan biaya yang minimal.

Ristono (2018) menyatakan bahwa manajemen persediaan adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengelola persediaan agar dapat memenuhi kebutuhan operasional secara efisien. Dalam definisi ini,

efisiensi menjadi faktor utama dalam pengelolaan persediaan.

Assauri (2019) menambahkan bahwa manajemen persediaan bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara biaya persediaan dan tingkat pelayanan yang diinginkan. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen persediaan tidak hanya berfokus pada ketersediaan barang, tetapi juga pada efisiensi biaya

2.1.3.1 Tujuan Manajemen Persediaan

Tujuan utama manajemen persediaan adalah untuk memastikan bahwa persediaan tersedia dalam jumlah yang cukup tanpa menimbulkan biaya yang berlebihan. Menurut Assauri (2019), tujuan manajemen persediaan adalah untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan barang.

Selain itu, Heizer dan Render (2020) menyatakan bahwa manajemen persediaan bertujuan untuk menghindari terjadinya kelebihan maupun kekurangan stok. Kelebihan stok dapat menyebabkan pemborosan, sedangkan kekurangan stok dapat mengganggu operasional. Tujuan lainnya adalah meningkatkan efisiensi operasional serta menjaga akurasi data persediaan. Dengan data yang akurat, organisasi dapat mengambil keputusan yang tepat dalam pengelolaan barang

2.1.3.2 Proses Manajemen Persediaan

Proses manajemen persediaan melibatkan beberapa tahapan yang saling berkaitan. Menurut Bowersox et al. (2021), proses ini meliputi perencanaan, pengadaan, penyimpanan, distribusi, dan pengendalian.

Setiap tahapan memiliki peran penting dalam menjaga kelancaran aliran barang. Kesalahan pada salah satu tahapan dapat menyebabkan ketidaksesuaian data persediaan. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang baik dalam setiap tahapan pengelolaan persediaan agar sistem dapat berjalan secara optimal.

2.1.3.3 Pengendalian Persediaan

Pengendalian persediaan merupakan bagian penting dari manajemen persediaan yang bertujuan untuk memastikan bahwa jumlah persediaan sesuai dengan kebutuhan. Menurut Ristono (2018), pengendalian dilakukan melalui monitoring dan evaluasi secara berkala. Heizer dan Render (2020) menyatakan bahwa pengendalian persediaan penting untuk menjaga keseimbangan antara biaya dan tingkat pelayanan. Dalam praktiknya, pengendalian dilakukan melalui sistem pencatatan dan inventarisasi fisik.

2.1.4 Barang Milik Negara (BMN)

Barang Milik Negara (BMN) merupakan salah satu komponen penting dalam pengelolaan aset pada instansi pemerintah. BMN mencakup seluruh barang yang diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun dari sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Definisi ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Menurut Mardiasmo (2018), dalam konteks sektor publik, pengelolaan aset negara harus dilakukan secara akuntabel dan transparan

karena berkaitan dengan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Oleh karena itu, setiap barang yang termasuk dalam kategori BMN harus dicatat, dikelola, dan diawasi dengan baik. BMN tidak hanya mencakup aset tetap seperti gedung dan kendaraan, tetapi juga meliputi persediaan barang habis pakai yang digunakan dalam kegiatan operasional. Dengan demikian, pengelolaan persediaan merupakan bagian integral dari pengelolaan BMN secara keseluruhan.

2.1.4.1 Prinsip Pengelolaan BMN

Pengelolaan BMN dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip yang bertujuan untuk menjamin penggunaan aset secara optimal. Prinsip-prinsip tersebut meliputi akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan efektivitas. Prinsip akuntabilitas mengharuskan setiap penggunaan barang dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun hukum.

Menurut Mardiasmo (2018), akuntabilitas dalam sektor publik merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang berkepentingan. Dalam hal ini, pengelolaan BMN harus dapat dipertanggungjawabkan melalui laporan yang akurat dan dapat dipercaya. Selain itu, prinsip transparansi menuntut adanya keterbukaan dalam pengelolaan barang, sehingga seluruh proses dapat diawasi dengan baik. Sementara itu, prinsip efisiensi dan efektivitas menekankan pada penggunaan barang secara optimal tanpa menimbulkan pemborosan.

2.1.4.2 Siklus Pengelolaan BMN

Siklus pengelolaan BMN terdiri dari beberapa tahapan yang saling berkaitan, yaitu perencanaan kebutuhan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, serta penghapusan. Setiap tahapan memiliki peran penting dalam memastikan bahwa barang dapat digunakan secara optimal.

Menurut ketentuan dalam pengelolaan BMN, perencanaan kebutuhan dilakukan untuk menentukan jenis dan jumlah barang yang dibutuhkan. Selanjutnya, pengadaan dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan, seperti pengadaan barang/jasa pemerintah. Setelah barang diperoleh, tahap berikutnya adalah penggunaan dan pemanfaatan. Pada tahap ini, barang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional instansi. Selain itu, pengamanan dan pemeliharaan juga perlu dilakukan untuk menjaga kondisi barang agar tetap baik. Tahap terakhir adalah penghapusan, yaitu proses mengeluarkan barang dari daftar BMN apabila sudah tidak digunakan atau mengalami kerusakan.

2.1.4.3 Persediaan Sebagai Bagian dari BMN

Persediaan merupakan salah satu bentuk BMN yang bersifat habis pakai dan digunakan dalam kegiatan operasional sehari-hari. Berbedandengan aset tetap, persediaan memiliki tingkat perputaran yang lebih tinggi sehingga memerlukan pengelolaan yang lebih intensif.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, persediaan termasuk dalam aset lancar yang harus dicatat dan dilaporkan secara

periodik. Hal ini menunjukkan bahwa persediaan memiliki peran penting dalam penyusunan laporan keuangan instansi pemerintah.

Pengelolaan persediaan yang tidak optimal dapat menyebabkan ketidaksesuaian data serta menurunkan kualitas laporan keuangan. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan yang baik untuk memastikan bahwa data persediaan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

2.1.5 Analisis Akar Masalah

Analisis akar masalah atau *Root Cause Analysis* (RCA) merupakan sebuah pendekatan sistematis yang dirancang untuk mengidentifikasi penyebab dasar dari suatu ketidakteraturan atau kegagalan proses dalam suatu organisasi. Dalam konteks manajemen aset pemerintah, RCA berfungsi sebagai instrumen evaluasi untuk menemukan jawaban mengapa terjadi kesenjangan antara data administratif dengan kondisi fisik di lapangan. Menurut Heizer dan Render (2020), terdapat tujuh alat kualitas utama yang dapat digunakan organisasi untuk melakukan identifikasi dan analisis masalah operasional secara sistematis. Ketujuh metode tersebut meliputi: (1) Lembar Periksa (*Check Sheet*) sebagai formulir pengumpulan data, (2) Diagram Pencar (*Scatter Diagram*) untuk melihat hubungan antar variabel, (3) Diagram Sebab-Akibat (*Cause-and-Effect Diagram*) atau Diagram Fishbone untuk memetakan akar penyebab masalah secara multidimensi, (4) Diagram Pareto untuk menentukan prioritas penyelesaian masalah berdasarkan dampak terbesar, (5) Diagram Alir (*Flowchart*) untuk membedah urutan proses secara grafis, (6) Histogram untuk melihat

distribusi frekuensi data, serta (7) Bagan Kendali (Statistical Process Control Chart) untuk memantau stabilitas sebuah proses dari waktu ke waktu. Di antara ketujuh instrumen yang dikemukakan oleh Heizer dan Render tersebut, penelitian ini secara spesifik mengadopsi Diagram Sebab-Akibat (Fishbone Diagram) sebagai alat analisis utama. Pemilihan metode ini didasarkan pada argumen paling kuat bahwa masalah pengelolaan barang persediaan di BPTD Kelas II Banten bersifat kualitatif dan kompleks, yang melibatkan interaksi antara faktor fisik lingkungan dan faktor administratif manusia. Fishbone Diagram memberikan keunggulan dalam memvisualisasikan seluruh ekosistem penyebab masalah ke dalam kategori Man, Method, Material, Machine, dan Environment.

2.1.5.1 Metode *Fishbone Diagram*

Salah satu instrumen paling efektif dalam melakukan analisis akar masalah adalah *Fishbone Diagram* atau yang dikenal sebagai Diagram Ishikawa. Metode ini merupakan alat grafis yang digunakan untuk memetakan hubungan sebab-akibat secara terstruktur guna mengidentifikasi kategori penyebab potensial dari suatu masalah spesifik. Menurut Gaspersz (2020), *Fishbone Diagram* memberikan kerangka berpikir yang komprehensif bagi peneliti untuk mengorganisir berbagai penyebab masalah ke dalam kelompok-kelompok logika, sehingga memudahkan dalam melihat interaksi antar faktor penyebab. Dalam pengelolaan gudang, diagram ini membantu membedah apakah inefisiensi yang terjadi bersumber dari faktor teknis, lingkungan kerja, maupun prosedur administratif yang tidak dipatuhi.

2.1.5.2 Kategori Penyebab Dalam Fishbone Diagram

Dalam mengidentifikasi masalah pengelolaan persediaan, *Fishbone Diagram* membagi penyebab masalah ke dalam beberapa kategori utama yang sering disebut sebagai variabel 6M. Heizer dan Render (2020), menjelaskan bahwa kategori tersebut terdiri dari:

1. *Man* (Manusia): Berkaitan dengan kompetensi, ketelitian, beban kerja, serta kedisiplinan staf dalam menjalankan prosedur penatausahaan BMN.
2. *Measurement* (Pegukuran): Berfokus pada pengukuran, evaluasi maupun pengendalian terkait *stock* barang persediaan di gudang
3. *Method* (Metode): Meninjau standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku, efektivitas sistem pencatatan di aplikasi SAKTI, serta sinkronisasi alur dokumen pengeluaran barang.
4. *Material* (Barang): Berfokus pada karakteristik barang yang dikelola, termasuk pelabelan, kodefikasi, serta pengemasan barang persediaan di dalam gudang.
5. *Machine* (Sarana): Mencakup ketersediaan infrastruktur pendukung seperti rak penyimpanan, alat angkut, hingga keandalan perangkat keras dan jaringan yang digunakan untuk input data.
6. *Environment* (Lingkungan): Menganalisis kondisi fisik tempat penyimpanan, termasuk tata letak (layout) gudang, pencahayaan, kebersihan, serta keterbatasan ruang yang dapat menghambat mobilitas petugas.

2.2 Kajian Penelitian Terdahulu

- 1) Penelitian yang dilakukan oleh Rosalin, Suryanto, dan Muttaqin (2024) berjudul "Upaya Pengelolaan Persediaan Zat Kimia Barang Habis Pakai untuk Menjaga Kesesuaian Kuantitas yang Dilakukan oleh Lembaga Pemerintahan Non Departemen (LPND)". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan persediaan barang habis pakai, khususnya zat kimia, dalam rangka menjaga kesesuaian antara jumlah barang yang tercatat dalam administrasi dengan jumlah fisik barang yang tersedia. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan persediaan telah dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku, namun masih ditemukan beberapa kendala yang memengaruhi akurasi data persediaan
- 2) Penelitian yang dilakukan oleh Shandi Santika dan R. Luki Karunia (2025) berjudul "Analisis Inventarisasi Barang Milik Negara pada Satuan Kerja Sekretariat Dukungan Kabinet". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan tertib administrasi dan meningkatkan akurasi data aset pemerintah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan inventarisasi BMN telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, namun masih ditemukan beberapa kendala dalam implementasinya.

- 3) Penelitian yang dilakukan oleh Deni Kurniawansyah dan Joni Devitra (2023) berjudul "Sistem Informasi Persediaan Barang Habis Pakai Pada Dinas Lingkungan Hidup". Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengembangkan sistem informasi persediaan barang habis pakai yang mampu mendukung proses pengelolaan persediaan secara lebih efektif dan terintegrasi. Metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan sistem informasi persediaan dapat membantu meningkatkan ketepatan pencatatan barang, mempercepat proses pencarian data, serta mempermudah proses monitoring stok barang.
- 4) Penelitian yang dilakukan oleh Ramdany dan Yuni Setiawati (2021) berjudul "Analisis Penatausahaan Aset Tetap Barang Milik Negara (BMN)". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penatausahaan aset tetap Barang Milik Negara pada instansi pemerintah serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam proses administrasi aset. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif Hasil penelitian menunjukkan bahwa penatausahaan BMN telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun masih ditemukan beberapa kendala yang memengaruhi kualitas pengelolaan aset. Kendala tersebut meliputi keterlambatan pemutakhiran data aset, kurang optimalnya kegiatan inventarisasi, keterbatasan sumber daya manusia yang menangani BMN, serta belum maksimalnya pengawasan terhadap aset yang dimiliki instansi

- 5) Penelitian yang dilakukan oleh Sri Septia Ningsih dan Nurhazana (2024) berjudul "Pengelolaan Persediaan Barang Habis Pakai (BHP) di Perguruan Tinggi: Studi Kasus di Politeknik Negeri Bengkalis". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pengelolaan persediaan barang habis pakai mulai dari tahap perencanaan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, penggunaan, hingga pengawasan dan pengendalian persediaan. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan persediaan barang habis pakai telah berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku, namun masih ditemukan beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Kendala tersebut meliputi keterlambatan penyampaian kebutuhan barang, belum tersedianya standar operasional prosedur yang terperinci pada beberapa aktivitas persediaan.
- 6) Penelitian yang dilakukan oleh Farias, Li, dan Peng (2024) berjudul "*Fixing Inventory Inaccuracies at Scale*" pada jurnal *Manufacturing & Service Operations Management* bertujuan untuk menganalisis ketidakakuratan persediaan (*inventory inaccuracies*) pada tingkat SKU dan store serta mengembangkan metode deteksi selisih stok secara lebih efisien. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis analisis data skala besar dan pemodelan algoritma deteksi anomali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaksesuaian antara data sistem dan kondisi fisik barang disebabkan oleh kesalahan operasional, lemahnya proses pencatatan, dan kurangnya kontrol terhadap pergerakan barang.

- 7) Penelitian yang dilakukan oleh Shabani et al. (2021) berjudul “*Inventory Record Inaccuracy and Store-Level Performance*” pada jurnal *International Journal of Production Economics* bertujuan untuk menganalisis penyebab ketidakakuratan catatan persediaan serta dampaknya terhadap kinerja operasional gudang dan toko. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inventory record inaccuracy disebabkan oleh kesalahan input data, ketidaktepatan proses replenishment, dan lemahnya pengawasan stok yang berdampak pada terjadinya stockout dan overstock.
- 8) Penelitian yang dilakukan oleh Rekik et al. (2025) berjudul “*Inventory Record Inaccuracy in Grocery Retailing*” pada jurnal *International Journal of Production Economics* bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakakuratan catatan persediaan pada sektor retail barang konsumsi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis data operasional dan analisis statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inventory record inaccuracy dipengaruhi oleh frekuensi restock, kesalahan pencatatan, dan kurang optimalnya kegiatan audit persediaan. Audit stok secara berkala terbukti meningkatkan akurasi data persediaan. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan yaitu sama-sama membahas pengelolaan persediaan dan akurasi data stok. Perbedaannya terletak pada objek penelitian yang dilakukan pada sektor retail, sedangkan penelitian ini dilakukan pada gudang instansi pemerintah BPTD Kelas II Banten.

- 9) Penelitian yang dilakukan oleh Best et al. (2022) berjudul “*On the Causes of Positive Inventory Discrepancies in Retail Stores*” pada jurnal *International Journal of Physical Distribution & Logistics Management* bertujuan untuk menganalisis penyebab terjadinya selisih positif persediaan antara data sistem dan kondisi fisik barang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui simulasi operasional retail. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selisih stok disebabkan oleh kesalahan penerimaan barang, kesalahan pencatatan, pergerakan barang yang tidak tercatat dalam sistem.
- 10) Penelitian yang dilakukan oleh Neve dan Schmidt (2022) berjudul “*Point-of-use Hospital Inventory Management with Inaccurate Usage Capture*”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan persediaan pada fasilitas kesehatan sektor publik yang mengalami ketidaktepatan pencatatan penggunaan barang sehingga menyebabkan ketidaksesuaian data persediaan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pemodelan sistem persediaan dan simulasi untuk mengevaluasi dampak ketidakakuratan pencatatan terhadap kinerja pengelolaan stok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaktepatan pencatatan penggunaan barang menyebabkan terjadinya inventory inaccuracy yang berdampak pada meningkatnya biaya persediaan, risiko kekurangan stok, serta ketidaksesuaian antara data yang tercatat dalam sistem dengan kondisi aktual barang yang tersedia.

3.1 Kajian Penelitian Terdahulu

No	Judul, Nama, Penulis, Tahun	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1	Rosalin, Suryanto, dan Muttaqin (2024), Upaya Pengelolaan Persediaan Zat Kimia Barang Habis Pakai untuk Menjaga Kesesuaian Kuantitas yang Dilakukan oleh Lembaga Pemerintahan Non Departemen (LPND)	Menganalisis pengelolaan persediaan barang habis pakai untuk menjaga kesesuaian kuantitas barang pada instansi pemerintah.	Kualitatif Deskriptif	menunjukkan bahwa masih ditemukan ketidaksesuaian jumlah barang persediaan akibat keterlambatan pencatatan transaksi, kurang optimalnya pelaksanaan stock opname, serta pengawasan yang belum berjalan maksimal. Kondisi tersebut menyebabkan perbedaan antara data administrasi dengan kondisi fisik barang sehingga memengaruhi akurasi informasi persediaan.	berfokus pada persediaan zat kimia barang habis pakai, sedangkan penelitian ini berfokus pada barang persediaan di Gudang BPTD Kelas II Banten menggunakan Fishbone Diagram.	Sama-sama membahas pengelolaan persediaan pada instansi pemerintah dan permasalahan selisih stok barang.
2	Shandi Santika dan R. Luki Karunia (2025), Analisis Inventarisasi Barang Milik	Menganalisis pelaksanaan inventarisasi BMN dalam mewujudkan tertib	Kualitatif Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa inventarisasi BMN telah berjalan sesuai ketentuan, namun masih ditemukan ketidaksesuaian antara data inventaris dengan	Penelitian terdahulu berfokus pada inventarisasi BMN secara umum,	Sama-sama membahas pengelolaan BMN pada instansi pemerintah dan kesesuaian antara

	Negara pada Satuan Kerja Sekretariat Dukungan Kabinet	administrasi aset pemerintah.		kondisi fisik barang, keterbatasan ruang penyimpanan, serta belum optimalnya pelabelan dan pengawasan aset. Inventarisasi secara berkala diperlukan untuk menjaga akurasi data BMN	sedangkan penelitian ini berfokus pada barang persediaan dan selisih stok.	data administrasi dengan kondisi fisik barang.
3	Deni Kurniawansyah dan Joni Devitra (2023), Sistem Informasi Persediaan Barang Habis Pakai pada Dinas Lingkungan Hidup	Mengembangkan sistem informasi persediaan barang habis pakai untuk mendukung pengelolaan persediaan yang lebih efektif. Research and Development (R&D)	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi persediaan mampu meningkatkan ketepatan pencatatan barang, mempercepat pencarian data stok, serta mempermudah monitoring persediaan. Sistem yang terintegrasi membantu meminimalkan kesalahan administrasi dan meningkatkan akurasi informasi persediaan.	berfokus pada pengembangan sistem informasi, sedangkan penelitian ini berfokus pada identifikasi penyebab selisih stok menggunakan Fishbone Diagram.	Sama-sama membahas pengelolaan persediaan dan pentingnya sistem informasi dalam mendukung pengawasan stok barang.
4	Ramdany dan Yuni Setiawati (2021), Analisis Penatausahaan Aset Tetap Barang Milik Negara (BMN)	Menganalisis pelaksanaan penatausahaan aset tetap BMN pada instansi pemerintah.	Kualitatif Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kendala dalam proses inventarisasi, pemutakhiran data aset, keterbatasan SDM pengelola BMN, serta belum optimalnya pengawasan aset.	Penelitian terdahulu berfokus pada aset tetap BMN, sedangkan penelitian ini berfokus pada	Sama-sama membahas pengelolaan BMN pada instansi pemerintah.

				Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan ketidaksesuaian antara data administrasi dengan kondisi fisik aset yang dimiliki instansi	barang persediaan di gudang.	
5	Sri Septia Ningsih dan Nurhazana (2024), <i>Pengelolaan Persediaan Barang Habis Pakai (BHP) di Perguruan Tinggi: Studi Kasus di Politeknik Negeri Bengkalis</i>	Menganalisis proses pengelolaan persediaan barang habis pakai mulai dari perencanaan hingga pengawasan.	Kualitatif Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengelolaan persediaan telah berjalan sesuai prosedur, namun masih ditemukan kendala berupa keterlambatan penyampaian kebutuhan barang, belum optimalnya pengawasan, dan belum tersedianya SOP yang rinci pada beberapa aktivitas persediaan. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi ketepatan informasi stok barang.	dilakukan pada lingkungan perguruan tinggi, sedangkan penelitian ini dilakukan pada Gudang BPTD Kelas II Banten.	Sama-sama membahas proses pengelolaan barang persediaan dan pengawasan stok barang.
6	Farias, Li, dan Peng (2024), <i>Fixing Inventory Inaccuracies at Scale</i>	Menganalisis ketidakakuratan persediaan (inventory inaccuracies) serta mengembangkan metode deteksi	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaksesuaian antara data sistem dan kondisi fisik barang disebabkan oleh kesalahan operasional, kelemahan proses pencatatan, dan kurangnya kontrol terhadap pergerakan barang.	Penelitian terdahulu berfokus pada pengembangan metode analitik untuk mendeteksi inventory	Sama-sama membahas ketidaksesuaian antara data persediaan dalam sistem dengan kondisi fisik barang yang tersedia.

		selisih stok secara lebih efisien.		Pendekatan analitik yang digunakan mampu meningkatkan kemampuan identifikasi selisih stok secara lebih cepat dan akurat dibandingkan metode konvensional.	inaccuracies pada sektor ritel, sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis penyebab selisih stok barang persediaan di Gudang BPTD Kelas II Banten menggunakan Fishbone Diagram	
7	Shabani, Maroti, de Leeuw, dan Dullaert (2021), <i>Inventory Record Inaccuracy and Store-Level Performance</i>	Menganalisis penyebab ketidakakuratan catatan persediaan dan dampaknya terhadap kinerja operasional.	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa inventory record inaccuracy disebabkan oleh kesalahan input data, ketidaktepatan proses replenishment, dan lemahnya pengawasan stok. Kondisi tersebut berdampak pada terjadinya stockout, overstock, serta penurunan kinerja operasional dalam pengelolaan persediaan.	dilakukan pada sektor ritel dan toko komersial, sedangkan penelitian ini dilakukan pada instansi pemerintah yaitu BPTD Kelas II Banten dengan fokus pada analisis penyebab selisih stok.	Sama-sama membahas ketidaksesuaian data persediaan dan pentingnya pengawasan dalam menjaga akurasi stok barang.

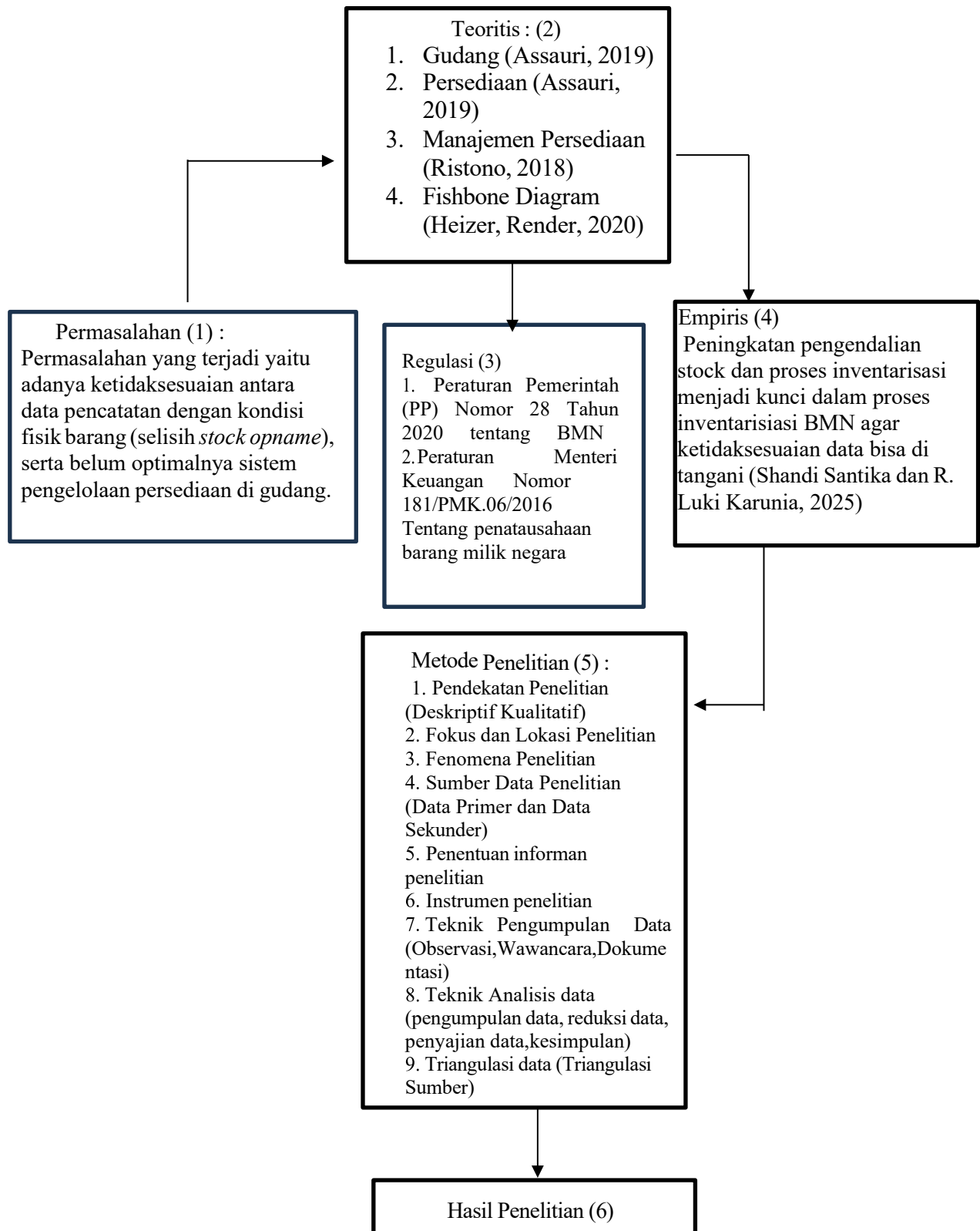
8	Rekik, Oliva, Glock, dan Syntetos (2025), <i>Inventory Record Inaccuracy in Grocery Retailing</i>	Menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi ketidakakuratan catatan persediaan pada sektor retail barang konsumsi.	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakakuratan data persediaan dipengaruhi oleh frekuensi restock, kesalahan pencatatan, dan kurang optimalnya kegiatan audit persediaan. Audit stok secara berkala terbukti mampu meningkatkan akurasi data dan mengurangi terjadinya selisih stok.	Penelitian terdahulu dilakukan pada sektor retail barang konsumsi, sedangkan penelitian ini dilakukan pada gudang barang persediaan BPTD Kelas II Banten.	Sama-sama membahas pengelolaan persediaan dan pentingnya pengendalian stok untuk menjaga akurasi data persediaan.
9	Best, Glock, Grosse, Rekik, dan Syntetos (2022), <i>On the Causes of Positive Inventory Discrepancies in Retail Stores</i>	Menganalisis penyebab terjadinya selisih positif persediaan antara data sistem dan kondisi fisik barang.	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa selisih stok disebabkan oleh kesalahan proses penerimaan barang, kesalahan pencatatan, pergerakan barang yang tidak tercatat dalam sistem, serta lemahnya kontrol operasional gudang. Faktor-faktor tersebut dapat menyebabkan perbedaan yang signifikan antara data persediaan dan kondisi fisik barang yang tersedia.	Penelitian terdahulu dilakukan pada retail store dengan pendekatan simulasi operasional, sedangkan penelitian ini dilakukan pada gudang BPTD Kelas II Banten menggunakan Fishbone	Sama-sama membahas penyebab terjadinya selisih antara data persediaan dengan kondisi fisik barang.

					Diagram	
10	Neve dan Schmidt (2022), <i>Point-of-use Hospital Inventory Management with Inaccurate Usage Capture</i>	Menganalisis pengelolaan persediaan pada fasilitas kesehatan sektor publik yang mengalami ketidaktepatan pencatatan penggunaan barang.	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaktepatan pencatatan penggunaan barang menyebabkan inventory inaccuracy yang berdampak pada meningkatnya biaya persediaan, risiko kekurangan stok, serta ketidaksesuaian antara data sistem dan kondisi aktual barang. Pengawasan dan pengendalian persediaan secara berkala diperlukan untuk meningkatkan akurasi data persediaan.	Penelitian terdahulu dilakukan pada fasilitas kesehatan sektor publik, sedangkan penelitian ini dilakukan pada Gudang BPTD Kelas II Banten dengan fokus pada analisis penyebab selisih stok barang persediaan menggunakan Fishbone Diagram	Sama-sama membahas ketidaksesuaian antara data persediaan yang tercatat dalam sistem dengan kondisi fisik barang yang tersedia serta pentingnya pengawasan dalam menjaga akurasi stok.

2.3 Alur Kerangka Penelitian

Penelitian ini diawali dengan identifikasi permasalahan yang terjadi pada pengelolaan barang persediaan di Gudang BPTD Kelas II Banten, yaitu adanya selisih antara data stok yang tercatat dengan kondisi fisik barang saat pelaksanaan stock opname. Selisih stok tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam proses pengelolaan persediaan yang berpotensi memengaruhi akurasi data dan tertib administrasi Barang Milik Negara (BMN). Untuk menganalisis permasalahan tersebut, penelitian menggunakan landasan teori yang meliputi teori persediaan, manajemen persediaan, teori pergudangan, dan Diagram Fishbone. Landasan teori digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya selisih stok barang persediaan di gudang. Penelitian ini juga mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara sebagai pedoman dalam menilai kesesuaian pelaksanaan pengelolaan persediaan di BPTD Kelas II Banten. Selain itu, penelitian terdahulu yang relevan digunakan sebagai referensi dan bahan perbandingan dalam proses analisis.

Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Melalui analisis Diagram Fishbone, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya selisih stok barang persediaan di Gudang BPTD Kelas II Banten. Hasil penelitian selanjutnya digunakan sebagai dasar penyusunan rekomendasi berupa Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan barang persediaan yang mencakup proses penerimaan, penyimpanan, pencatatan, dan pengeluaran barang guna meminimalkan terjadinya selisih stok serta mendukung tertib administrasi persediaan.



Gambar 2.1 Alur Kerangka Penelitian